

PENGARUH KUALITAS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

Ali Amin Kalau

Universitas Pattimura

aliaminkalau_febis2005@yahoo.com

ABSTRACT

This study analyzes the influence of the quality of budgeting and the effectiveness of budget control on the performance of SKPD, where this study was conducted on several SKPDs in the West Seram District of Maluku Province using survey methods through questionnaire instruments. This study uses saturated samples because all the study populations totaling 42 SKPDs were the object of observation. The analytical method used is the method of multiple regression analysis. Based on the results of hypothesis testing it can be concluded that the quality of budget-based performance and the effectiveness of budget control simultaneously and partially affect the performance of the SKPD.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas penyusunan anggaran dan efektifitas pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD, dimana penelitian ini dilakukan pada beberapa SKPD di Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku dengan menggunakan metode survey melalui instrumen kuesioner. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh karena semua populasi penelitian yang berjumlah 42 SKPD menjadi objek pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kualitas penyusunan anggaran berbasis Kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Kata kunci: *Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja; Efektifitas Pengendalian Anggaran dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*

1. PENDAHULUAN

Sejak digulirkannya reformasi dibidang keuangan maka pusat dan daerah dituntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya. Salah satunya dengan lahirnya Undang-undang No.17 tahun 2003 yang mengharuskan adanya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam sektor publik yang menuntut pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam proses penganggaran. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance Budgeting*). Selanjutnya sebagai penyempurnaan secara tehnik, telah ditetapkan Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan pendekatan sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara lokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut,

serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. PBK dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas (*tax payers*).

Perencanaan penganggaran yang berkualitas harus didukung oleh sistem yang memberikan keyakinan mematuhi penerapan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku. Biro Perencanaan dan Keuangan bersama APIP melakukan penelitian anggaran melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan

Anggaran berbasis kinerja telah diterapkan di organisasi sektor publik sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang No.17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, berbagai penilaian atas kinerja pemerintah yang hasilnya lebih banyak mencitrakan diri sebagai sosok birokrasi pemerintah yang buruk (*bad government*), khususnya dari sisi kinerjanya. Berbagai indikator penilaian, terutama yang dilakukan oleh lembaga internasional, seringkali masih menempatkan birokrasi pemerintah Indonesia pada posisi yang

sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Survey yang dilakukan Global Competitiveness Index dan Asean Research Survey menempatkan Indonesia Pada tahun 2013-2014 berada di posisi 38 selain itu, daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya masih berada urutan bawah seperti Singapura yang berada di posisi 2, Malaysia di posisi 20, dan Thailand di posisi 31.

Rendahnya kualitas birokrasi dalam proses pengelolaan keuangan tidak saja terjadi pada pusat pemerintahan. Didaerah juga, khususnya propinsi Maluku, Sesuai hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2016, BPK Perwakilan Maluku menemukan indikasi adanya kerugian negara mencapai Rp 58.378.235.611,05. Disamping potensi kerugian negara senilai Rp 224.590.346.415,18 yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku, dan Pemerintah Provinsi Maluku. Indikasi kerugian negara tertinggi ditempati Kabupaten Buru Selatan (Bursel) senilai Rp 25.584.870.019,35, disusul Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Rp 10.384.377.911,06. Posisi ketiga ditempati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) senilai Rp 4.774.276.660,05. Selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Rp 3.443.458.205,90, Kabupaten Kepulauan Aru Rp 3.041.169.469,57. Kemudian, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) senilai Rp 2.341.782.957,05. Berikut, Kabupaten Buru Rp 2.124.220.563,19, Pemkot Tual Rp 1.800.690.321,54, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Rp 1.414.078.405,81, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) senilai Rp 1.393.012.505,73, Pemkot Ambon Rp 1,291.325.170. Sementara Pemprov Maluku senilai Rp 784.983.341,05. (intimnews.com,2016).

Indikasi kerugian negara ini disebabkan karena belanja barang atau pengadaan barang/jasa fiktif, belanja perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja tidak sesuai atau diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya atau melebihi ketentuan berupa gaji, tunjangan, honor, perhitungan bantuan parpol, dan sebagainya. Selain itu, kekurangan volume pekerjaan fisik, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan,

pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi, kelebihan pembayaran, kas di bendahara keuangan pengeluaran yang tidak disertai dengan bukti fisik, dan penggunaan uang daerah untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya Temuan potensi kerugian negara juga tertinggi di Kabupaten Bursel, yaitu senilai Rp 77.695.584.950,74. Kemudian Kabupaten SBB senilai Rp 40.724.880.840,00, Kabupaten MBD Rp 35.979.515.546,35, Kabupaten MTB Rp.22.421.468.987,72, Pemkot Tual Rp 20.328.248.175,60, Kabupaten Malteng Rp.12.746.834.109,22, Pemprov Maluku Rp 10.533.763.403,32, Kabupaten SBT Rp.3.971.608.336,00, Pemkot Ambon Rp 122.970.000,00, Kabupaten Kepulauan Aru Rp.50.406.400,00, Kabupaten Buru Rp 35.905.656,23, dan Kabupaten Malra senilai Rp.15.160.000,00. (intimnews.com,2016).

Sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya potensi kerugian negara adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak ketiga, bangunan berdiri bukan di atas tanah Pemda melainkan di tanah milik masyarakat, kekurangan volume pekerjaan tetapi pembayaran dilaksanakan seluruhnya.

Dalam IHPS semester II tahun 2017 yang di laporkan BPK, ternyata kondisi LKPD kabupaten dan kota se Provinsi Maluku, masih sangat jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena masih banyak LKPD beberapa kabupaten kota di Propinsi Maluku yang masih mendapat Opini WTP bahkan ada beberapa LKPD yang tidak mendapatkan opini apapun disebabkan karena Pemerintah Daerah setempat belum melaporkan LPKD daerah setempat. Kenyataan bahwa masih terdapat beberapa LKPD di beberapa kabupaten kota seperti halnya Kabupaten Seram Bagian Barat yang mendapatkan opini disclaimer/TMP (tidak memberikan pendapat) bahkan sudah berlangsung selama lima tahun terakhir dari LKPD tahun 2012 sampai dengan LKPD Tahun 2016.

Secara ringkas laporan BPK tentang LKPD Semester II Tahun 2017, dan dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Opini LKPD Provinsi Maluku Tahun 2009 – Tahun 2013

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
LKPD TOTAL		12		12		12		12		6	
1	Propinsi Maluku	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	Kab. Buru	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
3	Kab. Buru Selatan	1	TMP								
4	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP								
5	Kab. Maluku Barat Daya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	Kab. Maluku Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
7	Kota Maluku Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
8	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP								
10	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		WDP
12	Kota Tual	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Sumber: BPK, IHPS semester II Tahun 2017

Hasil IHPS BPK diatas, menunjukkan bahwa dari proses perencanaan sampai dengan pengelolaan anggaran/keuangan pada Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) masih banyak terdapat permasalahan. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku, menemukan adanya ketidakberesan dalam beberapa bagian perencanaan dan pembangunan kantor Bupati Seram Bagian Barat. Bahkan sejumlah pekerjaan tidak pernah dilakukan, namun pembayaran sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Dari laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Perundangan, BPK RI menemukan ada dana sebesar Rp. 300.000.000,- yang tak layak dibayarkan. Selain itu, untuk perencanaan pembangunan talud, saluran, dan timbunan kantor bupati sebesar Rp10.877.074.132 tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum SBB. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan gambar rencana untuk pekerjaan utama, yaitu pekerjaan tanah sebesar Rp.6.672.019.384 tidak ada, sehingga gambaran acuan untuk melakukan pekerjaan penimbunan tidak ada. Kegiatan survei topografi yang dilakukan tidak dituangkan dalam gambar rencana, namun hanya digunakan untuk menghitung volume pekerjaan. Gambar rencana untuk pekerjaan pasangan sebesar Rp.2.537.530.764, berdasarkan laporan BPK, dinilai tidak lengkap. Mereka juga membeberkan dalam laporan, gambar penampang untuk talud yang berada di depan kantor bupati tidak ada. (intimnews.com,2016).

Kondisi yang terjadi diatas menunjukkan bahwa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat masih ada permasalahan dalam proses transformasi akuntansi sektor publik, dalam hal kualitas penganggaran dan fungsi akuntansi menyangkut pengendaliannya. Hal ini terindikasi dengan masih banyaknya ditemukan ketidakberesan, ketidakaturan dan ketidakbenaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran/keuangan daerah termasuk banyaknya aset negara yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan, pelaksanaan realisasi belanja dan pendapatan yang tidak akuntabel, yang pada ujungnya berimbas pada laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kondisi ini telah menyebabkan tata kelola pemerintahan bermuara pada predikat *Disclaimer* dimana hal ini terjadi juga disebabkan minimnya pengendalian dengan cara melakukan pengawasan oleh pengawas internal daerah, karena pengawasan adalah filter bagi tata kelola suatu pemerintahan. Pengawasan secara menyeluruh harus menjadi agenda pokok dan dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, disamping perlu adanya peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD, hal ini amat penting karena sumberdaya manusia yang memadai sangat menentukan kinerja

yang baik dari pengelolaan anggaran/keuangan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Selain itu, adanya proporsi belanja yang masih belum mencapai tingkat proporsional menyebabkan beberapa anggaran pada OPD/SKPD belum maksimal menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, hal ini tentunya berimbas pada kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dari alokasi belanja langsung yang diterima tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi tertinggi sebesar 40,12%, namun sangat disayangkan untuk pelayanan dasar seperti pada RSUD total sebesar 1,86%, serta beberapa kecamatan masih tergolong rendah. Sementara SKPD yang terendah alokasi belanja adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu satu pintu yakni sebesar 0,11% (sumber APBD Th.2014). Hal ini tentunya dibutuhkan kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja yang memadai.

Fenomena masih rendahnya kualitas penyusunan anggaran inipun bahkan dikeluhkan oleh Bupati Seram Bagian Barat yang disampaikan dalam acara Pembekalan penyusunan APBD sebagaimana dituangkan dalam website Pemerintahan kabupaten Seram Bagian Barat SBKAB.go.id, terkait perlunya diberikan pemahaman kepada pejabat terkait penyusunan dan penetapan APBD yang sesuai dengan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin harus lebih focus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketetapan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga menjadi hal penting dalam upaya memperbaiki opini BPK terkait LKPD SBB. Keluhan lainnya adalah terkait penetapan APBD Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2018 yang belum tepat waktu pada akhir Desember 2017 sesuai siklus penyusunan APBD sehingga terjadi sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan program daerah dengan kebijakan dan program nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap unit atau satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing unit atau satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengendalian merupakan suatu proses yang harus

dipengaruhi oleh pimpinan organisasi, manajemen dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Dengan adanya mekanisme pengendalian yang efektif pada unit atau satuan kerja perangkat daerah, maka tujuan dan kinerja satuan kerja perangkat daerah khususnya kinerja anggaran akan dapat dicapai.

Penelitian di bidang sektor publik, khususnya yang terkait dengan judul penelitian ini masih sangat terbatas. Meskipun demikian, penelitian yang terkait dengan anggaran berbasis kinerja telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam penelitian tersebut ditemukan masih adanya hambatan antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Sterck & Bouckaert (2006) yang berjudul *“The impact of performance budgeting on the role of parliament: a four-country study (Australia, the Netherlands, Sweden and Canada)”* membuktikan bahwa Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada empat Negara yang menjadi objek studi yakni Australia, Netherlands, Sweden and Canada di dominasi oleh kekuatan eksekutif dalam proses pembuatan anggaran.

Penelitian yang terkait dengan pengendalian terhadap kinerja juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hiro (2000) yang membuktikan bahwa secara kuantitatif pengendalian intern dalam organisasi sangat signifikan pengaruhnya dalam rangka pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Suryo pratolo (2006) juga membuktikan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh langsung pada kinerja perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian ini dirancang untuk menguji seberapa besar hubungan kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja SKPD melalui efektifitas pengendalian anggaran di Kabupaten Serang Bagian Barat. Dipilihnya Kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen karena, Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni dan Nurhayati (2013), Wibisono (2016) dan Nurida (2017) juga membuktikan bahwa anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh terhadap efisiensi pengalokasian belanja daerah yang merupakan salah satu dimensi dari kinerja organisasi sektor publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan dalam suatu instansi. Dalam perkembangannya, mekanisme birokrasi menjadi mekanisme yang sangat penting karena besarnya semakin meningkat. Perkembangan sistem penganggaran terjadi selaras dengan upaya pengalokasian sumber daya yang semakin lama semakin membaik dalam mengakomodasi berbagai penganggaran publik (Bastian, 2010).

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan

dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan Perusahaan untuk jangka waktu (periode tertentu dimasa yang akan datang). Anggaran merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang balik sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Halim, 2014)

Menurut Bastian (2010) pengertian anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (output measurement) sebagai indikator kinerja organisasi.

Pengertian anggaran kinerja menurut *Government Performance Result Act (GPRA)* dalam Soni Yuwono, dkk (2008) adalah :

“Performance budgeting is a systematic approach to help government become more responsive to the taxpaying public by linking program funding to performance and production.”

Government of Alberta, Canada mendefinisikan anggaran kinerja adalah :

“..... is a system of planning, budgeting, and evaluation that emphasizes the relationship between money budgeted and result expected”.

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pada hasil yang ingin dicapai dan setiap dana yang dikeluarkan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan pendekatan kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui *internal cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dalam tolak ukur sebagai standar kinerja.

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Sistem ini memerlukan indikator kinerja, standar kinerja, standar biaya dan *benchmark* dari setiap jenis pelayanan. Anggaran harus didasarkan pada sasaran yang hendak dicapai pada tahun anggaran tersebut, adanya standar pelayanan dan adanya ukuran biaya satuan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dapat merencanakan anggarannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tingkat prioritas setiap pekerjaan, tujuan dan sasaran tertentu yang disertai indikator penilaian yang jelas

dan dapat diukur sehingga masing-masing tingkat dalam suatu unit akan mempunyai suatu tanggung jawab yang jelas.

Dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan ABK, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan ASB. Anggaran disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan pencapaian hasil *output/outcome*. Dengan disusunnya APBD berbasis kinerja berarti pemerintah telah melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan mengarah pada bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bersamaan dengan peningkatan produktivitas. Kedua tujuan tersebut mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarnya. Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan *output* dan *outcome* yang diharapkan.

Kualitas Anggaran berbasis Kinerja menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dapat terwujud dengan adanya penyelenggaraan sebagai berikut :

- 1) Prinsip-Prinsip Penganggaran
- 2) Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- 3) Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran
- 4) Siklus Perencanaan Anggaran Daerah
- 5) Penggunaan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, (BPKP:2013)

2.2. Konsep Efektifitas Pengendalian Anggaran.

Pengendalian merupakan serangkaian aktivitas untuk mengimplementasikan keputusan yang direncanakan dan kemudian mengevaluasinya (Hongren 1996). Sawyer et al (2003) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut: *controlling is the process of making certain that directed action is carried out as planned to achieve some desired objective or goal*. Sawyer et al (2003) mengemukakan bahwa pengendalian ini melekat dari chief executive officer sampai dengan floor supervisor. Control ini sangat terkait dengan perencanaan bahkan Sawyer et al (2003) menyimpulkan control ini tidak akan efektif tanpa dokumen perencanaan. Sedangkan proses pengambilan keputusannya melibatkan setiap level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan tersebut akan sangat tergantung pada data tentang target kinerja yang diharapkan dapat dicapai.

Anthony dan Young (2003) menjelaskan pengendalian operasi mencakup dua aktivitas berbeda yaitu: Pengendalian keuangan, yang berhubungan dengan aktivitas pengeluaran. Aktivitas pengendalian keuangan meliputi dua aspek yaitu untuk menjamin

perencanaan yang ada di dalam anggaran ditaati dan untuk menyediakan suatu cara mengubah anggaran jika kondisi mensyaratkan dan Pengendalian kinerja, yakni Pengendalian kinerja bertujuan untuk menjamin bahwa kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian kinerja ini memusatkan pada produktivitas dan motivasi manajer dalam mengoperasikan program dan proyek secara efisien dan efektif.

Warren et al (2002) pengendalian anggaran adalah *the control function, or budgetary performance evaluation, compares the actual performance against the budget*. Dalam definisi ini pengendalian anggaran adalah membandingkan antara kinerja aktual dengan anggaran. Hal senada juga dikemukakan oleh Palmer (2000) yang menyatakan pengendalian anggaran adalah perbandingan antara kinerja aktual dengan anggaran.

Jones dan Pendlebury (2000) menjelaskan pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai.

Berkaitan dengan manajemen strategi, maka pengendalian anggaran berada pada tiap tahapan strategi. Dalam penyusunan strategi, pengendalian anggaran berfokus mengidentifikasi rencana kegiatan yang akan dibiayai dan rencana perolehan sumber dana. Dalam implementasi strategi, pengendalian anggaran berfungsi memantau realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Berdasarkan hal ini maka pengendalian anggaran berada dalam tiap tahapan strategi namun mengkhususkan pada anggaran.

2.3. Konsep Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Istilah “kinerja” merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja” atau “prestasi”. Dalam kamus Illustrated Oxford Dictionary, istilah ini menunjukkan “*the execution or fulfillment of a duty*” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas). Kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu (*previous performance*), dibandingkan dengan organisasi lain (*benchmarking*), dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Untuk dapat melakukan perbandingan ini atau pengukuran pencapaian tujuan tersebut, dibutuhkan suatu definisi operasional yang jelas tentang tujuan dan sasaran, *output* dan *outcome* pelayanan, dan pendefinisian terhadap tingkat kualitas yang diharapkan dari *output* dan *outcomes* tersebut, secara kuantitatif atau secara kualitatif

Problem pengukuran kinerja pada sektor swasta atau sektor publik termasuk pemerintah adalah menyangkut hubungan antara masalah ekonomi dengan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan

efektivitas institusi. Akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah dapat diukur dengan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja juga memiliki peranan yang signifikan dengan pengendalian guna menjamin bahwa organisasi dapat dikelola sesuai dengan keinginan semua *stakeholders*. Untuk menilai atau mengevaluasi kinerja suatu institusi harus dapat diukur kinerja tersebut.

Lin dalam Tuasikal (2006) menegaskan pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan *comparability* informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting.

Penetapan ukuran atau indikator keberhasilan sasaran dari fungsi-fungsi belanja pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan hal yang sangat penting untuk pencapaian kinerja. Oleh karena aktivitas dan pengeluaran biaya dilaksanakan pada tiap satuan kerja perangkat daerah, maka kinerja yang dimaksud akan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi satuan kerja perangkat daerah tersebut.

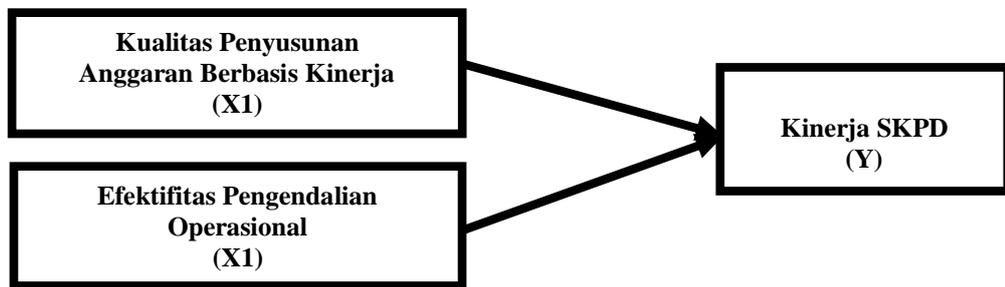
Pencapaian kinerja pemerintahan dapat dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Menurut Informasi laporan tersebut Kinerja pemerintah dapat terukur dengan kontribusinya dalam :

- 1) *Pengambilan keputusan yang lebih baik* yaitu dengan menyediakan informasi kepada pimpinan dalam melaksanakan fungsi pengendalian,
- 2) *Penilaian kinerja* dengan menghubungkan dua hal yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi dalam aspek manajemen personalia sekaligus memotivasi pegawai pemerintahan,
- 3) *Akuntabilitas*, dengan membantu pimpinan dalam memberikan pertanggungjawaban,

- 4) *Pemberian pelayanan*, dengan peningkatan kinerja layanan publik,
- 5) *Partisipasi publik* dapat ditingkatkan dengan adanya laporan yang jelas atas ukuran kinerja. Masyarakat akan terdorong untuk memberikan perhatian lebih besar sekaligus memberikan motivasi atas pelayanan publik agar dapat memberikan jasa layanan yang lebih berkualitas dengan biaya yang rasional,
- 6) *Perbaikan penanganan masalah masyarakat* dengan jalan memberikan pertimbangan kepada masyarakat guna memberikan jasa layanan yang lebih nyata dan spesifik. (PERMENPAN No.23 Tahun 2014 Tentang LAKIP).

3. METODOLOGI

Desain Penelitian Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, dalam penelitian ini variabel X1 adalah kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja dan Variabel X2 adalah Efektifitas pengendalian anggaran, sedangkan variabel Y adalah kinerja satuan serja pemerintah daerah (SKPD). Penelitian ini merupakan penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja dan Efektifitas pengendalian anggaran sebagai variabel independen terhadap kinerja Satuan kerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka desain penelitian sederhana akan digambarkan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Desain penelitian

3.1. Jenis data dan Prosedur Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dilapangan untuk mengetahui dan memperoleh langsung data yang peneliti perlukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui Kuisisioner.

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik pengambilan Sampel.

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan (Mudrajat Kuncoro, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah 42 SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun responden penelitian ini adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor pada masing-masing SKPD. Sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, karena kesemua populasi dijadikan

sampel. Teknik pengambilan sampling adalah menggunakan sensus dengan sampling jenuh.

3.3. Operasionalisasi Variabel.

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert.

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami konsep operasional dan indikator variabel penelitian pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Operasionalisasi variabel

Variabel	Dimensi	Skala
Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis kinerja (X ₁) (BPKP;2005)	1) Prinsip-Prinsip Penganggaran	Likert
	2) Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	Likert
	3) Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran	Likert
	4) Siklus Perencanaan Anggaran Daerah	Likert
	5) Penggunaan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.	Likert
Efektifitas pengendalian Anggaran (X ₂) (Anthony dan Young 2003)	1) Pengendalian keuangan	Likert
	2) Pengendalian kinerja	Ordinal
Kinerja SKPD (Y) (PERMENPAN No. 23 Tahun 2014 tentang LAKIP)	1) Pengambilan keputusan yang Lebih Baik	Ordinal
	2) Penilaian kinerja	Ordinal
	3) Akuntabilitas	Ordinal
	4) Pemberian pelayanan,	Ordinal
	5) Partisipasi publik	Ordinal
	6) Perbaikan penanganan masalah masyarakat	Ordinal

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Validitas

Ghozali (2010), mengemukakan bahwa suatu item kuesioner dapat dikatakan valid jika memiliki nilai kritis lebih besar dari koefisien korelasi (r) ≥ 0.3. dengan demikian maka item yang memiliki korelasi di atas 0,3 dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi di bawah 0,3 dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Hasil dari perhitungan koefisien korelasi untuk masing-masing variabel dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian X₁

No. Item	Koefisien Korelasi (r)	Nilai Batas (r)	Keterangan
X1.1	0,711	0.30	Valid
X1.2	0,837	0.30	Valid
X1.3	0,765	0.30	Valid
X1.4	0,725	0.30	Valid
X1.5	0,823	0.30	Valid
X1.6	0,474	0.30	Valid
X1.7	0,629	0.30	Valid
X1.8	0,733	0.30	Valid
X1.9	0,832	0.30	Valid
X1.10	0,785	0.30	Valid
X1.11	0,695	0.30	Valid
X1.12	0,676	0.30	Valid
X1.13	0,693	0.30	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 23.0 Tahun 2018

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian X₂

No.Item	Koefisien Korelasi (r)	Nilai Batas r	Keterangan
X2.1	0,821	0.30	Valid
X2.2	0,619	0.30	Valid
X2.3	0,736	0.30	Valid
X2.4	0,868	0.30	Valid
X2.5	0,812	0.30	Valid
X2.6	0,785	0.30	Valid
X2.7	0,873	0.30	Valid
X2.8	0,831	0.30	Valid
X2.9	0,625	0.30	Valid
X2.10	0,686	0.30	Valid
X2.11	0,827	0.30	Valid
X2.12	0,704	0.30	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 23.0 Tahun 2018

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Y

No.Item	Koefisien Korelasi (r)	Nilai Batas r	Keterangan
Y.1	0,631	0.30	Valid
Y.2	0,768	0.30	Valid
Y.3	0,627	0.30	Valid
Y.4	0,758	0.30	Valid
Y.5	0,715	0.30	Valid
Y.6	0,882	0.30	Valid
Y.7	0,683	0.30	Valid
Y.8	0,767	0.30	Valid
Y.9	0,664	0.30	Valid
Y.10	0,771	0.30	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 23.0 Tahun 2018

4.2. Uji Reliabilitas.

Setelah pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid untuk menjangkau data, maka dilanjutkan dengan uji realibilitas. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan kuesioner penelitian reliabel mengikuti ketentuan yang dikemukakan oleh Ghozali (2010) bahwa nilai reliabilitas yang dapat diterima menggunakan menggunakan *alpha cronbach* > 0,7, sedangkan jika *alpha cronbach* ≤ 0,7 menunjukkan bahwa data tersebut tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas variable-variabel tersebut dapat dilihat dari :

**Tabel 6. Hasil uji Reliabilitas variable X1
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,785	,786	13

**Tabel 7. Hasil uji Reliabilitas variable X2
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,740	,741	12

**Tabel 8. Hasil uji Reliabilitas variable Y
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,816	,817	10

4.3. Pengujian Hipotesis.

4.3.1. Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji-F Satatistik)

Uji F statistik pada dasarnya digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas (independen) secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel terikat (dependen). Nilai F diturunkan dari Tabel ANOVA (*Analysis of varinace*).

Hipotesis statistik di atas diuji menggunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel *Analysis of Varian* (Anova) seperti yang disajikan pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Hasil Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-sama

Predictors: (Constant), Kualitas Peny. Anggaran berbasis kinerja (X1),Eferktifitas Pengendalian

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	260,713	3	86,904	41,248	,000 ^b
	Residual	88,489	42	2,107		
	Total	349,202	45			

a. Dependent Variable: KSKPD_Y

b. Predictors: (Constant), EPA_X1, KABK_X2

Sumber: Data Olahan SPSS 23.0 IBM Tahun 2018 berdasarkan data hasil penelitian

4.3.2. Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-F Satatistik)

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas

anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD secara pasrial.

Adapun hasilnya pengujian koefisien regresi adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil pengujian koefisien regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.376	.1256		1.381	.008
	EPA_X1	2.153	.547	.433	3.252	.003
	KABK_X2	1.904	.345	.634	6.717	.000

a. Dependent Variable: KSKPD_Y

Sumber: Data Olahan SPSS 23.0 IBM Tahun 2018

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel bebas kualitas anggaran berbasis kinerja (X1) sebesar 3.252 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,003 sementara variabel Efektifitas Pengendalian

Anggaran (X2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6.717 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H0) dapat dilakukan dengan memiliki t_{hitung} dengan t_{tabel} atau

juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai tabel t_{student} dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas = $46-3-1=42$ untuk pengujian satu sisi adalah 1,381. Kriteria pengujian satu sisi adalah “tolak H_0 jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ”.

4.3.3. Hasil Uji Analisis Regresi.

Analisis Regresi Berganda (Multiple regression)

Guna menguji pengaruh kualitas anggaran berbasis kinerja (X_1) dan efektifitas pengendalian anggaran (X_2) terhadap kinerja SKPD (Y) di Kabupaten Seram Bagian Barat digunakan analisis regresi berganda dengan model persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y yaitu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

α yaitu Koefisien *intercept* (konstanta), yaitu nilai Y jika nilai seluruh variabel lain adalah nol
 β_1 yaitu Koefisien regresi variabel X_1
 β_2 yaitu Koefisien regresi variabel X_2
 X_1 yaitu Kualitas anggaran berbasis kinerja
 X_2 yaitu Efektifitas Pengendalian anggaran
 ε yaitu error term (*residual*) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diluar variabel-variabel yang diteliti

Untuk melihat pengaruh kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja (X_1) dan efektifitas pengendalian anggaran (X_2) terhadap kinerja SKPD (Y) dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda. Data yang digunakan sebagai variabel bebas adalah rata-rata skor untuk variabel kualitas anggaran berbasis kinerja (X_1), dan efektifitas pengendalian anggaran (X_2) sedangkan variabel variabel tak bebas adalah kinerja SKPD (Y).

Tabel 10. Hasil pengujian analisis regresi berganda

KABK_X2						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	13.376	.1256		1.381	.178
	EPA_X1	2.153	.547	.433	3.252	.003
	KABK_X2	1.904	.345	.634	6.717	.000

a. Dependent Variable: KSKPD_Y

Sumber: Data Olahan SPSS 23.0 IBM Tahun 2018

Hasil perhitungan koefisien regresi berdasarkan data penelitian yang diperoleh dapat ditulis dalam persamaan regresi taksiran sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 13,376 + 2,153 X_1 + 1,904 X_2$$

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa adanya hubungan yang linear positif dari kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD yang berarti semakin berkualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja dan semakin efektif pengendalian anggaran maka kinerja SKPD semakin meningkat

Dapat dijelaskan variabel kualitas anggaran berbasis kinerja (X_1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 2,153 berarti semakin baik kualitas anggaran berbasis kinerja maka semakin baik pula kinerja SKPD (Y), kemudian variable efektifitas pengendalian anggaran (X_2) dengan memiliki koefisien regresi positif sebesar 1,904 berarti semakin baik efektifitas pengendalian anggaran (X_2) maka kinerja SKPD (Y) semakin baik pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah. Kemudian jika tidak dilakukan kualitas anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran maka akan menurunkan kinerja SKPD sebesar 13,376 %.

Koefisien Determinasi (R^2)

Selanjutnya untuk melihat besarnya kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2). Hasil pengolahan data diperoleh koefisien determinasi untuk model regresi yang diperoleh (nilai R^2) dapat dilihat pada kolom ketiga dalam tabel berikut ini :

Tabel 11. Koefisien Determinasi Variabel X terhadap Y

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 ^a	.674	.621	1.5567

a. Predictors: (Constant), Kualitas Anggaran berbasis kinerja (X1), Efektifitas Pengendalian operasi (X2)
 b. Dependent Variable: Kinerja SKPD (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS 23.0 IBM Tahun 2018

Nilai *R-square* atau R^2 yang menunjukkan besar pengaruh variabel bebas yaitu kualitas anggaran berbasis kinerja (X_1), efektifitas pengendalian anggaran (X_2), terhadap variabel tak bebas (kinerja SKPD) adalah sebesar 0,674 atau 67,4%. Ini berarti bahwa 67,4% perubahan kinerja SKPD dapat

dijelaskan oleh kualitas anggaran berbasis kinerja, efektifitas pengendalian anggaran. Sedangkan 32,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati. Jadi dapat dikatakan bahwa kualitas anggaran berbasis kinerja; efektifitas pengendalian anggaran secara bersama-sama turut menentukan kinerja SKPD.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian.

4.4.1. Pengaruh Kualitas Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap kinerja SKPD.

Berdasarkan Dari hasil uji menggunakan SPSS 17.0 tentang pengaruh kualitas anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD diperoleh nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dengan koefisien beta sebesar 0.433 atau 43,3 %. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kualitas anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja SKPD, yang mana sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Nguyen, Hoang-Phuong (2007) yang menemukan tiga faktor utama kejayaan dari anggaran berbasis kinerja yaitu Manajemen ilmiah, Meningkatkan tekanan publik pada peran dan praktek pemerintah dan Perluasan tanggungjawab pemerintah. Dengan menerapkan kualitas anggaran berbasis kinerja, maka pemerintah dengan sendirinya telah menerapkan sistem manajemen yang baik dalam pemerintahan, demikian juga dengan semakin berkurangnya tekanan publik pada peran dan praktik pemerintahan karena adanya akuntabilitas dan transparansi. Selain itu kinerja anggaran biasanya dilekatkan dengan adanya pendampingan dalam proses realisasi dan penggunaan anggaran sehingga peran tanggungjawab pemerintah lebih luas lagi melalui pendampingan kegiatan-kegiatan pemerintahan melalui penggunaan anggaran daerah.

Adanya pengaruh keterkaitan variabel dalam penelitian ini dimana kualitas anggaran berbasis kinerja berpengaruh pada Kinerja SKPD haruslah menjadi perhatian Pemerintah Seram Bagian Barat (SBB) agar dalam proses penyusunan anggaran sampai kepada distribusi anggaran haruslah diterapkan sistem pendekatan melalui pendampingan kegiatan sehingga anggaran terpakai dapat terukur dan kinerja pemerintah dapat sesuai dengan harapan yang pada akhirnya diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menjadi rujukan penelitian ini yakni yang dilakukan oleh Fatowi dan Nurhayati (2013), Sterck & Bouckaert (2006), Sukismanto (2003), dan Hakim (2008).

4.4.2. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Anggaran Terhadap kinerja SKPD.

Berdasarkan Dari hasil uji menggunakan SPSS 17.0 tentang pengaruh efektifitas pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD diperoleh nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dengan koefisien beta sebesar 0.634 atau 63,4 %. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Efektifitas Pengendalian Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja SKPD. Hasil penelitian

ini, sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Soepardi (2005) yang menyatakan bahwa Pengendalian anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hiro (2000), yang menyatakan bahwa secara kuantitatif pengendalian intern dalam organisasi sangat signifikan pengaruhnya dalam rangka pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti diantaranya adalah Fatowi dan Nurhayati (2013) yang menyatakan bahwa efektifitas pengendalian anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh pratolo (2006) Djaperi (2005) yang menyatakan bahwa efektifitas pengendalian anggaran akan meningkatkan kinerja SKPD yang pada akhirnya akan menciptakan *good governance* dalam sistem keuangan internal pemerintah.

4.4.3. Pengaruh Kualitas Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektifitas Pengendalian Anggaran Terhadap kinerja SKPD.

Berdasarkan Dari hasil uji *coefisien determinasi* (R^2) menggunakan SPSS 17.0 tentang Pengaruh kualitas anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD diperoleh sebesar 0,674 atau 67,4%. Ini berarti bahwa variabel kualitas Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD secara simultan sebesar 67,4%. Dengan demikian ada sekitar 32,6% variabel lain yang masih dapat diteliti yang ada pengaruhnya dengan Kinerja SKPD. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Fatowi dan Nurhayati (2013), Sterck & Bouckaert (2006), Sukismanto (2003), Hakim (2008), Soepardi (2005) dan Suryo pratolo (2006) dan Djaperi (2005) yang kesemuanya menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran dengan menerapkan Kualitas Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektifitas Pengendalian Anggaran akan berpengaruh Terhadap kinerja SKPD.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas Anggaran berbasis Kinerja (X_1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja SKPD (Y) sebesar 43,3%.
2. Efektifitas Pengendalian Anggaran (X_2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja SKPD (Y) sebesar 63,4%.
3. Kualitas Anggaran berbasis Kinerja dan Efektifitas Pengendalian Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja SKPD (Y) sebesar 67,4%. sedangkan pengaruh faktor faktor lain yang tidak di amati dalam penelitian ini adalah 32,6%.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa kualitas Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan Efektifitas Pengendalian Anggaran mempunyai pengaruh terhadap Kinerja SKPD. Untuk itu pemerintah daerah agar menerapkan kualitas Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan Melaksanakan Efektifitas Pengendalian Anggaran secara tepat guna sehingga dapat menghasilkan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam berbagai kondisi dan dalam era otonomi daerah.
2. Meskipun penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup baik, namun keinginan untuk mencapai kondisi yang lebih baik tentunya merupakan cita-cita dari setiap pemerintah daerah, untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan kualitas anggaran berbasis kinerja dan Efektifitas Pengendalian Anggaran dengan lebih baik agar menghasilkan pengelolaan anggaran yang terstruktur dan sistematis pada SKPD masing-masing sehingga dapat memperoleh Opini WTP dari BPK.
3. Bagi peneliti (akademisi, praktisi) dan pihak-pihak lain yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang terkait dengan penelitian ini, disarankan untuk dapat menggali faktor-faktor lain selain kualitas Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan Efektifitas Pengendalian Anggaran terhadap kualitas Kinerja SKPD. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dimana masih terdapat 32,6% variabel lainnya yang mempengaruhi Kinerja SKPD dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Anthony, R. N. dan D. Young. 2003. *Management Control in Nonprofit Organization*. McGraw-Hill Companies, New York.
- Analisis Standar Belanja, Kabupaten Seram Bagian Barat 2015.
- Askam Tuasikal 2006. *Pengaruh Pengawasan Internal dan Eksternal, dan Pemahaman mengenai Sistem Akuntansi Keuangan dan Implikasinya terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung
- BPKP, 2013, *Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja*, Jakarta.
- BPK-RI, 2017. *Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2016*.
- Eddy Mulyadi Soepardi. 2005. *Peran Manajer dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Terhadap Pengendalian Anggaran Serta Kinerja Perusahaan* (survey pada BUMN klp usaha perkebunan, Kehutanan dan

- perdagangan). Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung.
- Hiro Tugiman. 2000. *Pengaruh Peran Auditor Internal serta Faktor-Fktor Pendukungnya terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja Perusahaan*. Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung.
- Horngren, Charles T. 1996. *Accounting*. New jersey: Prentice Hall.
- Imam Ghozali, 2010. *Structural Equation Modeling*. Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian 2010, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Irfan Fatoni Indah Dewi Nurhayati, 2013; *Pengaruh Anggaran dan Pengendalian Terhadap Efektifitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerahh (SKPD) di Kabupaten Malang*, Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 3, Malang.
- M. Djaperi. 2005. *Pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan Serta Insentif Bagi Karyawan Terhadap Kinerja Keuangan*. Tesis, program pasca sarjana universitas Padjadjaran.
- Miekatrien Sterck & Geert Bouckaert (2006) *The Impact of Performance Budgeting on The Role of Parliament: A Four-Country Study (Australia, The Netherlands, Sweden And Canada)*.
- Moch Lukmanul Hakim. 2008 *Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia* Tesis, program pasca sarjana universitas Padjadjaran.
- Mudrajat, Kuncoro. 2007, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi ketiga, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.23 Tahun 2014 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah, Jakarta.
- Phuong H. Nguyen, 2007 *Performance Budgeting: Its Rise and Fall*. MPRA Paper No. 9345
- Putri Dida Nurida, 2017, *Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh*. Universitas syahkuala. Aceh.
- Rowan, Jones dan Maurice. Pendlebury. 2000. *Public Sector Accounting*. 5th Edition. Pitman Publishing, London.
- Sawyer, B Lawrence. And Ditten A. Mortimer. 2003. *Internal Auditing the Practice of Modern Internal Auditing*. Edisi 5. The institute of internal auditors. Florida.
- Sony Yuwono, dkk, 2008, *Memahami APBD Dan Permasalahannya, Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi pertama, cetakan pertama, Bayumedia publishing. Malang.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta.
- Suryo Pratolo, 2006. *Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Manajer pada organisasi, Pengendalian Intern Terhadap Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan (Survei pada BUMN di Indonesia)*. Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Warren et. All, 2002, *Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 Update* by the Infectious Diseases Society of America, *Clinical Infectious Diseases*, Volume 49, Issue 1, 1 July 2009, Pages 1–45.